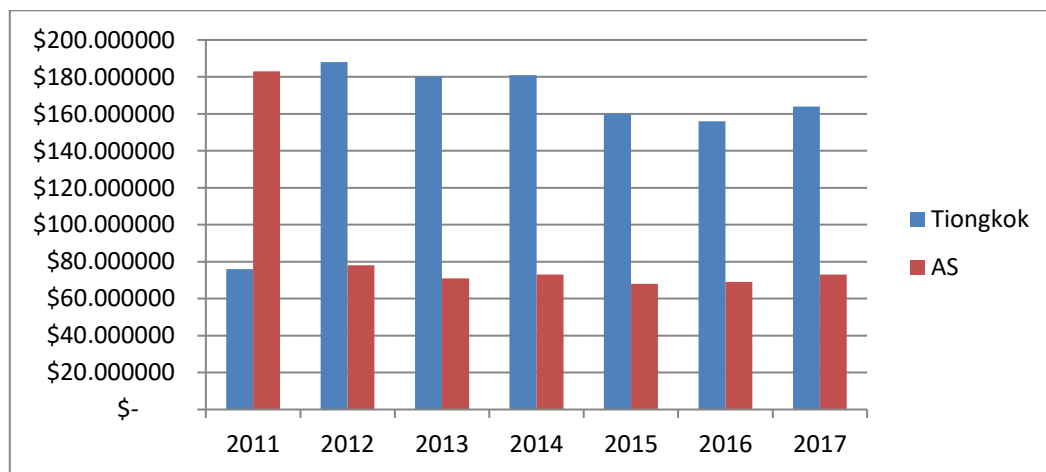


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang dan Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki pengaruh ekonomi yang cukup signifikan di kawasan Asia, khususnya Asia Timur. Hal ini disebabkan oleh status kedua negara tersebut yang masuk dalam kategori tiga besar dunia dengan Tiongkok berada pada posisi kedua dan Jepang pada posisi ketiga. Tak hanya itu, kedua negara tersebut juga memiliki hubungan ekonomi yang baik. Kegiatan dagang antara kedua negara ini juga terus berlangsung, bahkan Tiongkok menjadi negara importir terbesar bagi Jepang setidaknya sejak tahun 2011, meski sempat mengalami penurunan di tahun 2013 namun kembali meningkat pada tahun 2017 (WITS, 2017) (Grafik 1.1). Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Jepang.

Grafik 1.1. Jumlah Impor Jepang dari Amerika Serikat dan Tiongkok 2011-2017 (dalam US\$)

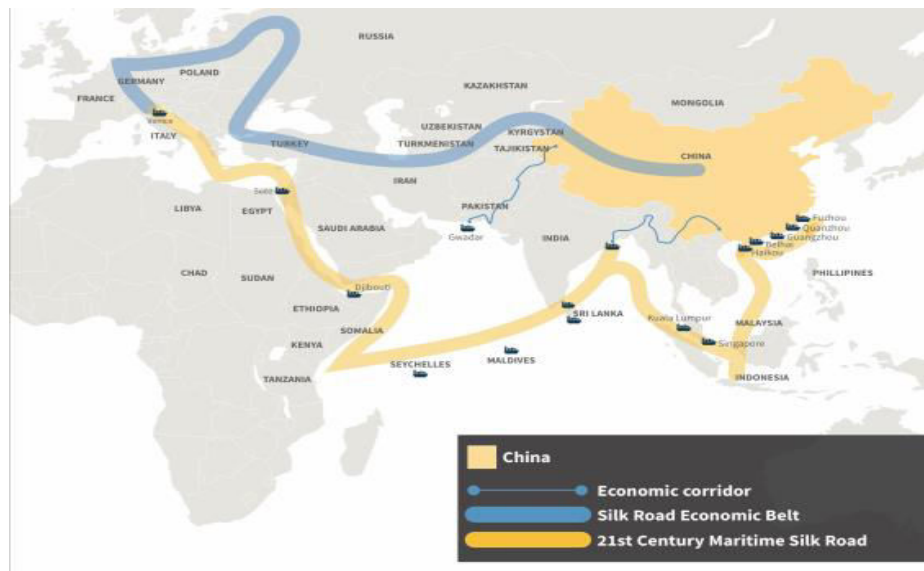


Sumber: dikompilasi oleh penulis dari World Integrated Trade Solution (2017)

Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jin Ping membentuk One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI). Dalam situs daring World Bank, Hofman (2015) menjelaskan bahwa BRI merupakan suatu proyek yang dibentuk

dengan tujuan menghubungkan perekonomian utama kawasan Eurasia melalui infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Lebih jauh, Cai (2017: 1) menjelaskan bahwa BRI mencakup dua konsep yakni *Silk Road Economic Belt* dan *New Maritime Silk Road*. Dalam hal ini, *Silk Road Economic* atau Sabuk Ekonomi Jalur Sutera berbasis daratan. Sedangkan, *New Maritime Silk Road* atau Jalur Sutera Maritim memiliki basis lintas samudera. Pada basis daratan, BRI melalui *Silk Road Economic* bertujuan untuk menghubungkan wilayah pedalaman Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Pada basis lintas samudera, Presiden Xi melalui *New Maritime Silk Road* hendak membangun Jalur sutera maritim dengan menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan wilayah-wilayah Tiongkok Selatan melalui jalur kereta api dan pelabuhan (Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Peta Jalur *Belt dan Road Initiative*



Sumber: Cai (2017: 2)

Proyek yang diinisiasi oleh Tiongkok di bawah pemerintahan Presiden Xi Jin Ping ini mendapatkan berbagai respon dari negara-negara lain. Polandia, misalnya memberikan respon yang positif terhadap proyek BRI Tiongkok. Polandia merupakan salah satu negara yang menandatangani *memorandum of understanding* terkait dengan BRI. Polandia melihat proyek BRI sebagai sebuah potensi besar khususnya

dalam aspek air, udara dan darat (Meiling, 2019). Selain itu, sebagian besar negara-negara ASEAN juga melihat BRI sebagai jalan untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar proyek-proyek BRI berupa kereta api, jalan hingga tenaga listrik di negara-negara ASEAN diinisiasi sejak tahun 2013 (Jusoh, 2018: 12).

Meski BRI memiliki arti penting bagi konektivitas ASEAN dan pengembangan negara-negara anggotanya, ada pula kekhawatiran yang muncul dari para ahli dan pembuat kebijakan yang ada di kawasan Asia Tenggara yang dapat mempengaruhi BRI tersebut. Kekhawatiran tersebut menyangkut perselisihan antara Tiongkok dan beberapa negara anggota ASEAN terkait dengan klaim wilayah di Laut Cina Selatan serta kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya BRI sebagai suatu strategi besar yang dimiliki oleh Tiongkok untuk menciptakan sistem *core to periphery* dalam struktur konektivitas tersebut dengan Tiongkok sebagai *core* dan negara-negara proyek BRI sebagai *periphery* (Chanborey, 2019).

Berbeda dengan negara-negara tersebut di atas yang memberikan respon positif terhadap BRI di awal diumumkannya pada tahun 2013, meski dalam dinamikanya diikuti kekhawatiran, Jepang tidak menunjukkan reaksi positif. Jepang sangat berhati-hati dan mengungkapkan akan memantau *The Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang merupakan wadah untuk membiayai investasi infrastruktur dalam skema BRI. Dalam merespon BRI Tiongkok, Jepang melakukan upaya-upaya menyeimbangi BRI Tiongkok. Upaya tersebut melalui proyek investasi yang dilakukan oleh Jepang khususnya di kawasan Asia. Proyek kereta api Jakarta-Bandung di Indonesia menjadi contoh upaya tersebut, meski pada akhirnya proyek ini dimenangkan oleh Tiongkok; dalam prosesnya menimbulkan kompetisi diantara kedua negara tersebut. Pada awalnya, Jepang dan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden S. B. Yodhoyono setuju untuk mengadakan studi lebih lanjut melalui adopsi teknologi kereta cepat Shinkansen untuk mengembangkan Jakarta dan Surabaya. Proyek tersebut dimulai dengan proyek jalur kereta api Jakarta-Bandung sebagai fase

pertama (Heriyanto, 2016). Namun, pada proses tawar menawar proyek ini di tahun 2015, Tiongkok terpilih untuk proyek tersebut, sedangkan Jepang berperan dalam meng-*upgrade* jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya (Brinza, 2018). Selain itu, Jepang dan Tiongkok juga bersaing untuk mendapatkan proyek pelabuhan di Bangladesh yang berhasil didapatkan oleh Jepang (Panda, 2017). Tak hanya itu, Jepang juga melakukan upaya penyeimbangan melalui *Asia-Africa Corridor* (AAGC) bersama dengan India. AAGC diajukan oleh Perdana Menteri Abe pada 2016 saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi (Panda, 2017). Dengan tujuan untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan Afrika, AAGC didasarkan pada empat pilar yakni proyek *development* dan kerjasama, infrastruktur berkualitas dan konektivitas kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan keterampilan serta kerjasama *people-to-people* (AAGC, 2019). Terlepas dari posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar bagi Jepang, Jepang dan Tiongkok merupakan kompetitor bagi satu sama lain dalam aspek ekonomi. Kim (2018: 49) menjelaskan bahwa ketegangan politik serta sensitifitas di antara kedua negara tersebut telah menjadi bagian dari sejarah mereka. Hal ini tentu berpengaruh terhadap respon Jepang terhadap BRI.

“There were instances in the past when we forgave an external loan. Right now, there is a demand for infrastructure in Asia. However, does the AIIB have the same capability as other banks in analyzing and judging whether it will be repaid and in examining the financing criteria? Does the AIIB have this kind of technical skill, governance, and capability? Can the AIIB do this correctly? Besides, do the Board of AIIB would conduct such a review? That is what we are asking. However, we have not received the response until now. No response. They are telling us like ‘this is the deadline,’ but we are the ones who are giving the deadline. We asked them to please give us an answer. However, there has been no response. Just like the US, our attitude is that we will join if they can demonstrate that they have the proper governance structure.” – Wakil Perdana Menteri Jepang, Taro Aso pada pertemuan House of Representative Financial Affairs Commite 2015 dalam (Nanwani, 2019: 124)

Namun, pada tahun 2017, Perdana Menteri Jepang, Shinso Abe menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap proyek Belt and Road Tiongkok. Jepang mengutus Sekretaris Jendral Partai Demokratis Liberal Jepang, Thoshiro Nikai untuk mengikuti Belt and Road Forum di Beijing pada Mei 2017 (East Asia Forum, 2017). Niat untuk bekerja sama dan turut memberikan dukungan dana dalam proyek BRI Tiongkok yang bernilai 1 Triliun US Dollar tersebut juga disampaikan langsung oleh Abe dalam sebuah forum yang membahas masa depan Asia pada Juni 2017 bahwa Jepang sudah siap untuk bekerjasama (Pollmann, 2017). Meski demikian, hal ini masih menjadi sekadar keinginan Jepang dan belum dilakukan secara resmi pada saat itu. Pada November 2017, dalam Pertemuan Pemimpin APEC, Perdana Menteri Abe kembali mengungkapkan ketertarikannya terhadap BRI Tiongkok (Ito, 2019: 124).

“As for the “One Belt, One Road” initiative, we look forward to this initiative making contributions in a forward-looking way to the peace and prosperity of the region and the world by adequately incorporating the thinking held in common by the international community regarding the openness, transparency, economic efficiency, financial soundness, and other such aspects of the infrastructure. Japan wishes to cooperate from this viewpoint.” – Perdana Menteri Abe dalam Ito (2019: 124-125).

Pada Agustus 2018, Jepang mulai merancang kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Tiongkok dengan mengirim Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takeo Akiba ke Tiongkok untuk mengatur hal tersebut (South China Morning Post, 2018). Lantas, Pada 25 Oktober 2018 Abe tiba di Tiongkok dan di sambut oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. Kunjungan ini menjadi kunjungan Pertama Jepang ke Tiongkok selama tujuh tahun terakhir. Kunjungan berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Oktober 2018. Dalam kunjungan ini, kedua negara membahas mengenai kerja sama ekonomi termasuk kerjasama BRI (Wong, 2018). Pada pertemuan tersebut, Perdana Menteri Abe mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Jepang dan Tiongkok. Menurut Perdana Menteri Abe, kondisi dan situasi internasional yang mengalami perubahan membuat Tiongkok dan Jepang semakin bergantung dengan satu sama lain. Perubahan kondisi dan situasi

internasional tersebut juga memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama mereka.

"Switching from competition to collaboration, I want to lift Japan-China relations to a new era... Japan and China are neighbours and partners. We will not become a threat of each other," – Zhinzo Abe saat kunjungan ke Jepang pada tahun 2018 dalam Shigeta Shunshuke, 2018

Dalam hal BRI, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying mengungkapkan bahwa Jepang menunjukkan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam proyek BRI Tiongkok. Kedua negara tersebut secara aktif melakukan kooperasi pasar ketiga dan akan menjadikan kerjasama pihak ketiga sebagai pilar dalam kerjasama kedua negara tersebut (Fianancial Express, 2018). Umirdinov (2019: 15) mendeskripsikan perjanjian kerjasama pasar atau pihak ketiga sebagai suatu instrumen yang ditujukan untuk mawadahi kerjasama antara dua negara yang bertindak sebagai investor di pasar ketiga. Kerjasama pasar atau pihak ketiga ini bertujuan untuk menyelaraskan produktivitas Tiongkok dengan teknologi negara-negara maju dan dengan permintaan pembangunan di negara-negara berkembang. Hal ini bertolak belakang dengan posisi awal Jepang yang menunjukkan sikap negatif terhadap pengesahan BRI. Oleh sebab itu, alasan di balik perubahan respon Jepang yang awalnya menyeimbangi BRI Tiongkok menjadi mendukung BRI menjadi aspek yang diteliti lebih lanjut oleh penulis.

"Japan has also expressed its readiness to actively participate in the BRI...We are now actively conducting third market cooperation. We are looking for more proactive cooperation in this regard," – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying saat kunjungan Perdana Menteri Abe ke Jepang pada tahun 2018 dalam Bussiness Standard, 2018

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jepang mengubah respon terhadap BRI Tiongkok dari menyeimbangi ke mendukung?

1.3 Tinjauan Pustaka

BRI Tiongkok merupakan proyek yang menarik untuk diteliti khususnya terkait dengan respon yang diberikan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, penulis merujuk kepada tiga tulisan tentang bagaimana reaksi Jepang terhadap BRI Tiongkok. Adapun ketiga tulisan tersebut ialah pertama, Nanwani (2019) yang berjudul “Belt and Road Initiative: Responses from Japan and India – Bilateralism, Multilateralism and Collaborations” menjelaskan mengenai respon dari Jepang dan India terhadap BRI Tiongkok dilihat dari aspek bilateral, multilateral, dan kolaborasi baik yang dilakukan secara terpisah oleh kedua negara tersebut maupun yang dilakukan secara bersama oleh India dan Jepang. Kedua, Ito (2019) yang berjudul “China’s Belt and Road Initiative and Japan’s Response: from Non-participation to Conditional Engagement” membahas mengenai latar belakang dari BRI Tiongkok serta rasionalitas dan respon Jepang terhadap BRI dari 2013 hingga 2018. Ketiga, Yingzi (2019) yang berjudul “Tangled, Hesitated and Joining: Japan’s Strategic Orientation under the “Belt and Road” Initiative” menjelaskan mengenai perubahan sikap Jepang terhadap BRI.

Nanwani (2019: 2) menyebutkan bahwa dalam merespon BRI Tiongkok, Jepang memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat, membentuk Free and Open Indo-Pacific Strategy (FOIPS) untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan melalui perluasan kemitraan untuk infrastruktur yang berkualitas dengan menggabungkan dua benua yakni Asia dan Afrika serta dua benua yakni Pasifik dan Hindia. Nanwani (3-4) menjelaskan bahwa oposisi yang diberikan oleh Jepang terhadap BRI Tiongkok lebih kepada aspek infrastruktur. Dalam hal ini, Jepang khawatir akan ekspansi Tiongkok dalam aspek infrastruktur khususnya di kawasan Asia Tenggara. Posisi yang di ambil oleh Jepang berhubungan dengan BRI Tiongkok menggambarkan kekhawatiran, *interest*, dan perspektif nasional dan geopolitik mereka. Selain itu, Nanwani juga menyebutkan bahwa terjadi perubahan sikap Jepang di pertengahan 2017 terhadap BRI Tiongkok melalui dukungan yang diberikan oleh Jepang terhadap

BRI Tiongkok. Meski demikian, Nanwani tidak menjelaskan secara lanjut mengenai perubahan tersebut.

Ito (2018: 115-116) mengungkapkan bahwa terdapat perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Jepang terhadap BRI yang diawal pembentukannya pada tahun 2013 tidak berpartisipasi sama sekali, pada tahun 2017 mengubah posisinya menjadi ikut serta. Ito (122-126) menjelaskan keikutsertaan Jepang tersebut sebagai *conditional engagement*, keikutsertaan yang disertai dengan syarat yakni keterbukaan, transparansi, efisiensi ekonomi, dan finansial yang baik. Dalam hal ini, Ito menyebutkan bahwa respon yang diberikan oleh Jepang terhadap BRI tersebut merupakan manifestasi dari strategi *risk-hedging*, Jepang hendak ikut serta secara selektif dalam BRI dan juga dilain sisi tetap mempertahankan dan memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa pada awal pembentukan BRI di tahun 2013, Jepang terkesan tidak tertarik namun selanjutnya di tahun 2015 berubah menjadi sebuah respon yang negatif, lalu di tahun 2016 bersikap *indecisive*, hingga pada 2017 bersikap positive terhadap BRI Tiongkok Yingzi (2019: 46). Yingzi (2019: 41-45) mengumpulkan data-data dari media Jepang dan website resmi Pemerintah Jepang mengenai sikap Jepang terhadap BRI tersebut. Yingzi juga menyebutkan bahwa perubahan sikap Jepang tersebut merefleksikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut seperti, stagnansi ekonomi yang di hadapi oleh Jepang, adanya *Rise of China* serta *trade protection* yang diterapkan oleh Amerika Serikat sebagai aliansi utama Jepang. Namun, tidak ada penjelasan dan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut (Yingzi, 2019: 47-48).

Penulis menggunakan ketiga penelitian tersebut di atas sebagai tinjauan pustaka karena ketiga penelitian tersebut membahas mengenai respon dan sikap Jepang terhadap BRI Tiongkok. Hal ini sejalan dengan penelitian yang hendak meneliti mengenai respon Jepang terhadap BRI Tiongkok. Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas yang cenderung berfokus kepada bagaimana respon dan sikap dari negara-negara khususnya Jepang terhadap BRI Tiongkok,

tulisan ini fokus pada penyebab perubahan respon dan sikap Jepang terhadap BRI Tiongkok dari tahun 2017 hingga 2018. Penyebab perubahan sikap tersebut dikaji melalui *strategic culture* yang dimiliki oleh Jepang, kondisi geoekonomi Jepang, dan posisi kekuatan dunia saat itu.

1.4 Kerangka Berpikir

1.4.1 Strategi dalam mempertahankan *status quo*

Pada dekade kedua abad kedua puluh, muncul diskusi mengenai *global power shift*. Dalam hal ini, terdapat transfer kekuatan dari ‘Barat’ ke ‘Timur’ yang secara dramatis mengubah konteks dalam menghadapi tantangan internasional (Hoge Jr., 2004: 128). *Power shifting* ini akan mengubah struktur internasional. Hal ini menjadi aspek yang krusial. *Structural Realism* menekankan bahwa sistem internasional merupakan sistem yang anarki yang tidak memiliki otoritas universal, keadaan struktur internasional menjadi aspek yang fundamental dalam mempengaruhi posisi negara terhadap negara lain. Kondisi sistem secara menyeluruh mempengaruhi perilaku suatu negara, bukan hanya faktor-faktor pada tingkat negara. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi negara dalam membentuk kebijakan luar negerinya (Waltz, 2000: 5-6).

Dalam hal ini, penurunan dan kebangkitan yang dimaksud ialah penurunan atau *decline* yang dialami oleh Amerika Serikat meski tidak secara absolut serta kebangkitan yang dialami oleh Tiongkok. Seperti yang disebutkan oleh Nye (2010: 6-8), Amerika Serikat mengalami suatu penurunan yang relatif yang dimulai dengan adanya krisis ekonomi global di tahun 2008, rendahnya angka pertumbuhan ekonomi dan aspek industri secara khusus dalam bidang teknologi inovatif. Dengan adanya *shifting power* tersebut khususnya di kawasan Asia Timur, Jepang perlu suatu strategi dan tindakan guna mempertahankan keamanan dan *status quo* negaranya.

Keamanan menjadi hal yang fundamental bagi suatu negara. Oleh sebab itu, negara harus menjaga dan mempertahankan keamanannya. Dalam menjaga dan mempertahankan keamanan dengan kondisi internasional yang anarki, negara

cenderung bergantung pada usaha sendiri. Sistem internasional yang kompetitif, negara perlu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan efisien (Lynn-Jones, 1995: 664-665). Taliafero (2000: 128-129) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan dan mempertahankan keamanan tersebut, cara ofensif dalam *offensive realism* dan cara defensif dalam *defensive realism* dapat dilakukan.

Offensive realism menyebutkan bahwa sistem internasional yang anarki memberikan insentif yang kuat untuk ekspansi terhadap negara lain. Dalam hal ini, semua negara berusaha untuk memaksimalkan kekuatan relatifnya terhadap negara lain sebab hanya negara yang *powerful* yang dapat menjamin kekuatannya. Oleh sebab itu, dalam *offensive realism*, cara-cara ofensif digunakan untuk menyerang dan menaklukkan negara lain. Lain halnya dengan *defensive realism* yang menyebutkan bahwa pencapaian *power* yang tepat sangat diperlukan. Hal ini menjadi aspek yang ditekankan dalam konsep *defensif realism* (Taliafero, 2009: 128-129). Dalam konsep *defensive realism*, pencarian kekuasaan yang berlebih dapat menjadi jalan bagi berakhirnya keamanan. Kerja sama merupakan hal yang beresiko, tapi kompetisi juga menjadi hal yang beresiko. Dalam kompetisi senjata, hasil tidak dapat diprediksi, kekalahan akan membahayakan negara (Taliafero, 2000: 130, 138).

Dalam sistem internasional yang anarki, cara-cara ofensif yang digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan dan mempertahankan keamanannya akan mengurangi keamanan negara lain. Hal ini akan menimbulkan dilema keamanan antara satu negara dengan negara-negara yang lain. Muncul kekhawatiran satu sama lain akan intensi dan kekuatan di masa depan, sehingga menimbulkan permusuhan atau konflik timbal balik, meskipun intensi awal suatu negara murni untuk meningkatkan keamanannya. Oleh sebab itu, penggunaan strategi-strategi moderat dan mempertahankan *status quo* menjadi pilihan yang tepat, terlebih jika harga yang harus dibayar untuk melakukan ekspansi lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Strategi-strategi moderat tersebut dilakukan melalui cara-cara defensif. Dalam hal ini, kondisi *status quo* yang dipertahankan oleh Jepang berubah akibat *decline* yang dialami oleh Amerika Serikat di tingkat global secara

khusus di tingkat regional. Strategi defensif ini juga dipengaruhi oleh kultur strategis yang dimiliki oleh Jepang (Talliaferro, 2000: 129-130).

1.4.2 Kultur Strategis dalam Mempengaruhi Respon Jepang

Gray (1999: 51- 52) dalam tulisannya yang berjudul “Strategic Culture as Context: The first generation of theory strikes back” menyebutkan bahwa kultur tidak dapat dipisahkan dari perilaku suatu aktor. Pada dasarnya, kultur tidak menentukan perilaku namun kultur memberikan pengaruh terhadap perilaku aktor. Gray juga menjelaskan bahwa strategi memiliki banyak dimensi dan kultur menjadi salah satunya. Istilah Kultur strategis muncul pertama kali dalam tulisan Snyder (1977: 38) yang berjudul “The Soviet Strategic Culture: Implication for Limited Nuclear Operations”. Dalam tulisan ini, Snyder melihat ada perbedaan dalam strategi yang digunakan oleh Soviet dan Amerika Serikat dalam menghadapi penggunaan senjata nuklir meski pendekatan yang digunakan sama yakni kultur.

Lebih lanjut, Klein (1991 5-7) menjelaskan bahwa adanya dilema dalam perang menjadi aspek yang mendasari kemunculan kultur strategis. Klein melihat adanya dikotomi yang tidak dapat dilepaskan dari perang. Pada dasarnya, Perang merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menjalankan kebijakan namun hal ini bukanlah hal yang terjadi secara alami dan mudah dilakukan. Terdapat dikotomi antara tuntutan kebijakan dan perintah di medan perang, perang dan politik memiliki tendensi yang berbeda. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah *framework* yang dapat memberikan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan, mendefinisikan tujuan serta mengidentifikasi cara yang dapat diggunakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Framework* inilah yang disebut sebagai kultur strategis. Snyder (1977: 1-3) menjelaskan pengoperasionalisasian *framework* ini dengan mengartikulasikan budaya strategis terkait dengan keamanan militer. Budaya Strategis terkait keamanan tersebut merupakan manifestasi menyeluruh dari opini publik yang disosialisasikan ke dalam mode pemikiran strategis. Konsekuensinya, sosialisasi ini menghasilkan seperangkat sikap, keyakinan, dan pola perilaku yang digunakan dalam menghadapi atau

menanggapi perang. Sehubungan dengan ini, paska Perang Dunia II, Jepang menghadapi isu perang dengan sikap yang tidak biasa. Trauma yang dihadapi oleh Jepang paska Perang Dunia II menjadikan Jepang sebagai negara *Pacifist*. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II mendorong Jepang bertransformasi dari *'warstate state'* ke *'peace state'* (Lenaga, 1993: 115-116).

1.4.3 Geoekonomi sebagai Strategi Jepang Paska Perang

Istilah geoekonomi muncul paska Perang Dingin. Luttwak (1990: 19-20) menjelaskan bahwa kemunculan istilah tersebut didasari oleh memudarnya kekuatan militer dalam *world affair* seiring dengan berakhirnya Perang Dingin sehingga metode perdagangan menggantikan metode militer. Dalam hal ini, modal menggantikan senjata, inovasi masyarakat menggantikan kemajuan teknis militer, dan pasar menggantikan pangkalan militer. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa paska Perang Dingin, hanya entitas ekonomi yang tersisa dalam arena internasional. Arena internasional masih dihuni oleh aktor negara yang menawarkan layanan, meregulasi ekonomi, membiayai dan mensponsori teknologi baru, serta menyediakan infrastruktur. Tidak hanya itu, batas-batas teritorial juga tidak menjadi kurang penting dalam geoekonomi, namun artikulasi atau peraturan nasional yang ketat menjadi lebih berkurang (Cowen dan Smith, 2009: 43). Oleh sebab itu, geoekonomi menjadi sebuah *tool* yang mengilustrasikan strategi interaksi antara negara dalam berbagai sektor ekonomi.

Luttwak (1990: 19) menjelaskan geoekonomi sebagai “logic of war in the grammar of commerce”, terdapat percampuran antara logika konflik dan perdagangan. Dengan begitu, ekonomi menjadi penyebab dan instrumen konflik. Dalam operasionalisasinya, geoekonomi menggunakan instrumen-instrumen ekonomi guna mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional negara (Blackwill dan Harris, 2016: 20). Berbeda dengan geopolitik yang fokus pada cara untuk memperoleh wilayah dengan tujuan memperoleh akumulasi pasar, geoekonomi fokus akumulasi kekayaan melalui kontrol pasar (Cowen dan Smith, 2009: 42).

Sehubungan dengan Jepang, geoekonomi telah menjadi aspek yang krusial dalam strategi Jepang. Hal ini dapat dilihat melalui cara-cara geoekonomi yang dilakukan oleh Jepang selama ini. Okana-Heijmans (2012: 62-64) menyebutkan bahwa praktik diplomasi ekonomi telah menjadi karakteristik utama Jepang dalam kebijakan luar negerinya setelah era Perang Dunia berakhir. Paska Perang, Jepang menjadi negara yang pasifis di bawah artikel 9 konstitusi Jepang, kondisi ini memberikan kerugian besar bagi Jepang; pasukan militer Jepang menjadi kehilangan pekerjaan sehingga Jepang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi serta berbagai macam kerugian lainnya. Namun, hanya dalam waktu satu dekade, perekonomian Jepang mampu pulih kembali dan bahkan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Beckley et al (2018: 1-2) menjelaskan bahwa hal ini didorong oleh adanya koalisi antara birokrat dan pebisnis Jepang di tahun 1950an dan 1960an yang berhasil meningkatkan ekspor Jepang. Tak hanya itu, Jepang juga meningkatkan investasi domestik, penerimaan teknologi asing, hambatan proteksionis dan perancangan kebijakan industri dengan baik. Hal inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. Dalam hal ini, kita dapat melihat aspek-aspek geoekonomi seperti inovasi Jepang, modal, pasar dalam upaya peningkatan ekonomi Jepang tersebut. Kemudian, aspek geografi, Jepang dan Tiongkok memiliki kedekatan teritorial yang berpengaruh pada hubungan kedua negara tersebut.

Selain itu, pada tahun 1991, identitas non-militer Jepang mencapai *turning point* di dunia Internasional melalui aksi yang dilakukan oleh Jepang terhadap Kuwait saat diinvasi oleh Irak dalam Perang Teluk I. Dalam hal ini, Jepang memilih untuk mengirim bantuan dalam bentuk uang kepada Kuwait dibandingkan dengan mengirim pasukan perang. Kemudian, cara geoekonomi Jepang juga terlihat dalam konflik dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan. Jepang memperketat ekspor teknologi ke Korea Selatan dalam menanggapi tuntutan Korea Selatan untuk memberi kompensasi terhadap korban kerja paksa Jepang saat masih menduduki Jepang (1910-1945). Tak sampai di situ, Jepang juga melakukan *trade restriction* sebagai senjata dalam menghadapi Korea Selatan. Jepang menghapus Korea Selatan dari “daftar

putih” yakni daftar negara-negara mitra dagang Jepang yang mendapat kontrol ekspor paling minimal (CNBC, 2019). Dalam hal ini, aspek ekonomi menjadi penyebab konflik dan juga menjadi langkah yang ditempuh untuk menyelesaikannya. Dukungan bahkan kerjasama Jepang terhadap proyek infrastruktur Tiongkok akan membantu Jepang untuk meningkatkan pengaruh terhadap infrastruktur di Kawasan Asia, Afrika dan Eropa. Hal ini sejalan dengan tujuan geoekonomi sebagai bentuk strategi untuk menguasai ekonomi (Cowen dan Smith, 2009: 42) yang dalam hal ini menyangkut proyek-proyek infrastruktur di kawasan.

1.5 Hipotesis

Dari kerangka berpikir di atas, Penulis mengajukan dua hipotesis terhadap rumusan masalah yang ada. Pertama, adanya *power shifting*, Amerika Serikat sebagai aliansi Jepang dan aktor utama di kawasan Asia mengalami *decline* dengan mulai menarik diri dari kawasan Asia Timur dan disaat bersamaan, Tiongkok mengalami kebangkitan *power*. Kedua, kondisi *strategic culture* Jepang yang menggunakan konstitusi damai (*Heiwa-Kenpō*) membuat Jepang tidak lagi memiliki hak untuk memulai perang atau men-*challenge* Tiongkok dengan cara-cara ofensif. Kondisi ini mendorong Jepang untuk menggunakan pendekatan geoekonomi dalam kancah global. Jepang menggunakan kekuatan ekonominya guna mendukung eksistensinya di kancah global.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Defenisi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 *Power shifting*

Power shifting adalah suatu konsep yang menjelaskan mengenai perubahan posisi kekuatan dalam sistem internasional. Kappel (2015: 4) menyebutkan bahwa *power shifting* merupakan perubahan dalam sistem internasional yang ditandai dengan adanya *decline* yang dialami oleh suatu negara sedangkan negara lain mengalami *rising*. Sejalan dengan hal tersebut, Fels (2012) melihat *power shift* sebagai kondisi sistem internasional yang mengalami transisi kekuasaan dengan

adanya *emerging power* yang muncul bersamaan dengan *relative decline* yang dialami oleh negara yang selama ini menjadi negara adidaya. *Relative decline* merupakan suatu kondisi stagnannya atau melemahnya kekuatan ekonomi sebuah entitas dibandingkan dengan kekuatan ekonomi entitas lain (Kappel, 2015: 4).

Kondisi inilah yang dialami oleh Amerika Serikat yakni pertumbuhan ekonomi yang stagnan bahkan melemah sebagai suatu kekuatan dunia. Selain itu, indikator *decline* dari Amerika Serikat juga tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari aspek pengaruh di kawasan global khususnya di kawasan Asia Timur. Indikator tersebut yakni pandangan skeptikal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap aliansi AS-Jepang dan meminta Jepang untuk membayar lebih *security umbrella* yang disediakan Amerika Serikat terhadap Jepang. Tak hanya itu, bentuk *decline* tersebut dapat dilihat melalui keputusan untuk menarik diri dari *Trans Pacific Partnership* (TPP). Chow et al (2018: 74-75) menyebutkan bahwa hal ini memberikan tanda *declining* keterlibatan Amerika Serikat di kawasan dan melemahkan kepemimpinan ekonomi Amerika Serikat di kawasan sehingga Amerika Serikat kehilangan kesempatan untuk memimpin integrasi yang menetapkan standar *Region Trade Agreement* (RTA) di Asia. Hal ini akan semakin memberikan jalan bagi Tiongkok untuk mempromosikan BRI dan memperkuat pengaruhnya.

1.6.1.2 *Strategic culture*

Strategic Culture merupakan cara pandang terhadap militer dan keamanan yang kemudian mempengaruhi pembuatan kebijakan. Cara pandang tersebut dibentuk oleh aspek-aspek kultural; cita-cita, respon emosional, dan kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat (Snyder, 1977: 34). Selain itu, kultur strategis juga memberikan gambaran dan informasi mengenai pilihan yang sesuai dan efektif dalam menanggapi perang (Duffield, 1999: 777). Sejalan dengan hal tersebut, Chappel (2009: 419) mendefinisikan kultur strategis sebagai seperangkat sikap, norma, dan keyakinan terhadap penggunaan kekuatan militer yang umumnya terbentuk dari sejarah suatu negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jepang memiliki konstitusi yang disebut sebagai konstitusi damai. Konstitusi damai atau disebut juga *Heiwa-Kenpō* dalam bahasa Jepang merupakan konstitusi yang digunakan oleh Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini disebut sebagai konstitusi damai karena isi dari artikel 9 yang menyatakan penolakan Jepang terhadap perang (Pemerintah Jepang, 1947). Dengan begitu, Jepang tidak dimungkinkan memulai perang, sehingga hal ini mengubah Jepang menjadi '*peace state*'. Keputusan Jepang untuk menolak perang dilatarbelakangi oleh aspek sejarah kelam Perang Dunia II yang menciptakan trauma bagi Jepang. Sejarah masa lalu Jepang inilah yang mempengaruhi cara pandang Jepang terhadap perang (Lenaga, 1993: 115-116). Oleh sebab itu, konstitusi damai yang dimiliki oleh Jepang menjadi kultur strategis yang memberikan pengaruh fundamental dalam menentukan kebijakan.

1.6.1.3 Geoekonomi

Pendekatan geoekonomi adalah suatu pendekatan interdisipliner yang mencakup faktor geopolitik, kecerdasan ekonomi, dan bertujuan untuk menyediakan instrumen bagi negara dan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi guna menaklukkan pasar (Csurgai, 2017: 2). Secara sederhana, Blackwill dan Harris (2016: 20) mendefinisikan pendekatan geoekonomi sebagai pendekatan yang menggunakan instrumen ekonomi dalam upaya mempertahankan dan mempromosikan kepentingan nasional suatu negara. Csurgai (2017: 6-7) menyebutkan bahwa aspek kultural, historis dan geopolitik telah mendorong Jepang untuk mengembangkan ekonominya. Kondisi wilayah yang relative kecil, populasi yang mengalami penurunan atau grey population, kurangnya sumber daya alam, serta pengalaman kelam dari Perang Dunia II menjadi aspek-aspek yang mempengaruhi pemikiran strategis Jepang dan mendorong Jepang untuk mengembangkan geoekonominya.

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif. Dalam hal ini, penelitian eksplanatif merupakan penelitian

yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti dengan variabel-variabel yang lain (Umar, 1999: 36). Variabel dalam sebuah penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi dan menjelaskan variabel lainnya. Sebaliknya, variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel independen (Sugiyono, 2013: 38). Perubahan sikap Jepang terhadap BRI merupakan variabel dependen. Variabel independennya ada dua yaitu: (1) *power shifting* di kawasan; (2) kultur strategis Jepang sebagai negara pasifis yang terefleksikan dalam pemilihan pendekatan geoekonomi sebagai respon kebijakan luar negeri.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari pernyataan pejabat-pejabat Jepang dan Tiongkok, pernyataan Presiden Trump di media dan twitter. Data sekunder diambil dari buku, jurnal, penelitian, artikel-atikel yang dipublikasikan dalam surat kabar, majalah maupun situs daring, skripsi terdahulu serta literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.4 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi jangkauan penelitian yang dilakukan dengan mengambil fokus sejak Jepang menunjukkan penolakannya pada BRI pada awal-awal pembentukannya di tahun 2013 hingga pada saat Jepang menunjukkan kesiapannya untuk ikut terlibat dalam BRI Tiongkok Jepang melalui kunjungan Perdana Menteri Abe ke Tiongkok pada tanggal 25-27 Oktober 2018 yang membahas serta mengesahkan hal terkait kerja sama bidang ekonomi termasuk pembahasan mengenai BRI.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Untuk mendukung keperluan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Moleong (2005: 6) mendefenisikan analisis data kualitatif sebagai suatu tipe analisis data yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara alamiah dan menyeluruh. Pemahaman tersebut didapatkan melalui deskripsi yang dimanifestasikan dalam kata-kata dan bahasa. Dalam hal ini, fenomena tersebut terkait dengan motivasi, persepsi, perilaku, dan sebagainya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bab satu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, operasional konsep, tipe penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. Bab dua berisi analisis terhadap hubungan AS-Jepang dan *decline* yang dialami oleh Amerika Serikat sebagai aliansi utama Jepang. Bab tiga berisi analisis tentang kondisi kultur strategis dan geoekonomi Jepang dan pengaruhnya terhadap perubahan respon Jepang terhadap BRI Tiongkok. Bab empat berisi kesimpulan dari penelitian yang mencakup temuan-temuan penelitian dan konfirmasi terhadap argumentasi penelitian.